



ANALISIS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN PROVINSI PAPUA TAHUN 2015–2019

Merry Ratar¹, Jourie Pangemanan², Korinus Sasarari³

¹Akuntansi, Ekonomi, Universitas Nusantara Manado

²Akuntansi, Ekonomi, Universitas Nusantara Manado

³Akuntansi, Ekonomi, Universitas Nusantara Manado

¹merry@nusantara.ac.id, ²jourie@nusantara.ac.id, ³korinus@nusantara.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pendapatan daerah Kabupaten Waropen dengan menelaah selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan baik secara nominal maupun persentase, menilai pertumbuhan pendapatan daerah, mengukur tingkat kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah, menganalisis derajat desentralisasi fiskal, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah, dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah selama periode 2015–2019 secara rata-rata mencapai 157 persen dari target yang dianggarkan. Meskipun demikian, tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah dan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dan provinsi masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja pemungutan PAD tergolong efektif, kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri masih perlu ditingkatkan.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, kinerja keuangan daerah, pertumbuhan pendapatan

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang melibatkan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang tersedia guna menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi. Proses ini menuntut adanya kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta agar potensi ekonomi lokal dapat dimanfaatkan secara optimal. Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperluas basis ekonomi daerah agar lebih beragam dan berkelanjutan.

Kabupaten Waropen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua dengan karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi yang khas. Berdasarkan hasil sensus penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Waropen pada tahun 2020 tercatat sebanyak 33.943 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Kondisi demografis tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan ekonomi dan keuangan daerah. Struktur perekonomian daerah yang masih didominasi oleh sektor konstruksi, pertanian, kehutanan, dan perikanan menuntut adanya pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien.

Pendapatan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah sebagai komponen utama pendapatan daerah mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap kinerja pendapatan daerah Kabupaten Waropen menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja pendapatan daerah Kabupaten Waropen selama periode 2015–2019, meliputi analisis varians anggaran pendapatan, pertumbuhan pendapatan, kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, efektivitas dan efisiensi PAD dan pajak daerah, serta kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.

2. LANDASAN TEORI

Pembangunan ekonomi daerah pada hakikatnya harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan harga diri manusia, serta perluasan kebebasan individu dalam berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Pendapatan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan tersebut karena menjadi sumber pembiayaan utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pendapatan daerah menurut Standar Akuntansi Pemerintahan didefinisikan sebagai semua penerimaan kas yang menjadi hak pemerintah daerah dalam satu periode anggaran dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tingginya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut.

Analisis kinerja keuangan daerah dapat dilakukan melalui berbagai rasio keuangan, antara lain analisis varians, analisis pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah, derajat desentralisasi, serta rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan. Rasio-rasio tersebut digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara optimal dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan daerah, publikasi Badan Pusat Statistik, serta dokumen resmi pemerintah daerah. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis varians anggaran pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan, perhitungan rasio kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan efisiensi PAD dan pajak daerah, serta analisis kontribusi BUMD.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis varians pendapatan asli daerah dilakukan untuk mengetahui selisih antara anggaran dan realisasi PAD selama periode penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Waropen selama tahun 2015–2019 secara konsisten melampaui target yang dianggarkan. Rata-rata tingkat capaian realisasi

PAD mencapai 157 persen, yang menunjukkan bahwa kinerja pemungutan PAD tergolong sangat efektif.

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Selisih (Rp)	Capai-an (%)
2015	4.706.611.614	5.533.166.614	826.555.000	118
2016	4.145.811.687	6.851.483.623	2.705.671.936	165
2017	17.812.450.652	27.403.770.234	9.591.319.582	154
2018	1.946.686.521	3.539.430.038	1.592.743.517	182
2019	505.167.146	841.945.243	336.778.097	167
Rata-rata				157

Tabel 1. Analisis Varians Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2015–2019

Gambar 1 memperlihatkan grafik perbandingan antara anggaran dan realisasi PAD Kabupaten Waropen selama periode 2015–2019 yang menunjukkan kecenderungan realisasi selalu berada di atas anggaran.

Analisis pertumbuhan pendapatan menunjukkan bahwa PAD dan pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif pada periode 2015–2017, namun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2018 dan 2019. Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro serta faktor manajerial dalam pengelolaan keuangan daerah.

Analisis rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Waropen masih tergolong rendah dengan rata-rata rasio sebesar 1,12. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

Analisis rasio ketergantungan keuangan daerah memperkuat temuan tersebut dengan nilai rata-rata rasio sebesar 0,79. Tingginya rasio ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari transfer pemerintah pusat.

Derajat desentralisasi fiskal yang diukur melalui kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan nilai yang sangat rendah dengan rata-rata sebesar 0,0088. Hal ini menandakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam



menyelenggarakan desentralisasi fiskal masih terbatas.

Analisis efektivitas dan efisiensi PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan PAD secara efektif dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 1,57. Demikian pula, efektivitas pemungutan pajak daerah tergolong sangat baik dengan rata-rata rasio sebesar 4,04.

Kontribusi BUMD terhadap PAD selama periode 2015–2018 menunjukkan nilai yang cukup signifikan dengan rata-rata sebesar 59,62 persen, meskipun pada tahun 2019 tidak terdapat kontribusi dari BUMD.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kinerja pendapatan daerah Kabupaten Waropen selama periode 2015–2019 menunjukkan realisasi PAD yang melampaui target anggaran dan tergolong efektif. Namun demikian, tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah dan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tinggi. Derajat desentralisasi fiskal yang rendah menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan potensi PAD serta meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah agar kemandirian fiskal dapat tercapai secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik. Kabupaten Waropen Dalam Angka 2016–2020. Waropen.
- Mahmudi. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nurlan Darise. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks.
- Todaro, M.P. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.